

## PERAN MONEY POLITIC DALAM DEMOKRASI: DAMPAK DAN TANTANGAN BAGI INTEGRITAS PEMILU

Dimas Maulana<sup>1</sup>, Syahidin<sup>2</sup>  
dimasmaulana@upi.edu<sup>1</sup>, syahidin@upi.edu<sup>2</sup>  
Universitas Pendidikan Indonesia

### ABSTRAK

Money politic atau politik uang telah menjadi fenomena yang meresahkan dalam proses demokrasi di banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik ini tidak hanya mencoreng integritas pemilu, tetapi juga berdampak negatif terhadap kualitas pemerintahan yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak money politic terhadap pemilu dan demokrasi, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya memberantasnya. Metode yang digunakan meliputi studi literatur, wawancara dengan ahli, dan analisis data pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa money politic secara signifikan mempengaruhi hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

**Kata Kunci:** Money Politic, Demokrasi, Pemilu, Integritas Pemilu, Politik Uang.

### ABSTRACT

*Money politics has become a troubling phenomenon in the democratic process in many countries, including Indonesia. This practice not only tarnishes the integrity of elections but also negatively impacts the quality of the resulting government. This study aims to identify the impact of money politics on elections and democracy, as well as the challenges faced in efforts to eradicate it. The methods used include literature review, expert interviews, and election data analysis. The results of the research show that money politics significantly affects election outcomes and public trust in the democratic system.*

**Keywords:** Money Politics, Democracy, Elections, Election Integrity, Vote Buying.

### PENDAHULUAN

Money politic, atau sering disebut politik uang, merujuk pada penggunaan uang atau barang untuk mempengaruhi hasil pemilu dan preferensi pemilih. Praktik ini melibatkan pemberian uang, barang, atau janji-janji materi kepada pemilih sebagai imbalan atas dukungan politik. Fenomena ini menjadi masalah serius karena mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan bersih. Demokrasi yang sehat seharusnya menjamin bahwa pemilu dilakukan secara bebas, jujur, dan adil, tanpa ada pengaruh yang merusak dari uang.

Di Indonesia, politik uang telah menjadi praktik yang cukup mengakar dan sering terjadi dalam setiap siklus pemilu, baik di tingkat lokal maupun nasional. Meskipun berbagai regulasi telah dibuat untuk memberantas praktik ini, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang secara tegas melarang politik uang, implementasi di lapangan sering kali kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya penegakan hukum yang tegas, lemahnya sistem pengawasan, dan budaya politik yang sudah terbiasa dengan praktik korupsi.

Praktik politik uang tidak hanya berdampak pada integritas pemilu, tetapi juga pada kualitas pemerintahan yang dihasilkan. Kandidat yang terpilih melalui politik uang cenderung lebih rentan terhadap korupsi dan tidak fokus pada kepentingan publik, melainkan pada upaya untuk mengembalikan biaya politik yang telah mereka keluarkan. Selain itu, politik uang juga menurunkan kualitas partisipasi politik, di mana pemilih tidak lagi memilih berdasarkan visi, misi, dan kompetensi kandidat, tetapi berdasarkan imbalan materi yang mereka terima.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang dampak politik uang terhadap proses demokrasi di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan praktik ini. Dengan menggunakan metode studi literatur, wawancara mendalam, dan analisis data pemilu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang masalah ini dan menawarkan solusi yang efektif untuk mengatasinya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara mendalam. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber akademis, laporan lembaga pemantau pemilu, dan regulasi terkait money politic. Wawancara mendalam dilakukan dengan para ahli di bidang politik, anggota KPU, dan aktivis pemantau pemilu. Selain itu, analisis data pemilu dari beberapa periode pemilu terakhir di Indonesia juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran empiris mengenai pengaruh money politic.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang memiliki dampak signifikan terhadap integritas pemilu dan kepercayaan publik. Pertama, data dari ICW menunjukkan bahwa 40% pemilih di Indonesia mengaku menerima uang atau barang sebagai imbalan untuk memilih kandidat tertentu pada pemilu 2019. Tingginya prevalensi politik uang ini mencerminkan bahwa praktik ini masih lazim dan diterima dalam konteks pemilu, menandakan bahwa banyak pemilih dan kandidat terjebak dalam siklus korupsi yang mengikis demokrasi.

Studi kasus di beberapa daerah mengungkapkan bahwa kandidat yang menghabiskan lebih dari Rp 1 miliar untuk kampanye memiliki peluang menang yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang mengeluarkan lebih sedikit dana. Di salah satu daerah pemilihan di Jawa Barat, kandidat yang mengeluarkan dana kampanye besar berhasil memenangkan kursi dengan selisih suara signifikan. Ini menunjukkan bahwa kemampuan finansial kandidat menjadi faktor penentu kemenangan, bukan visi atau kompetensi mereka, sehingga melemahkan prinsip-prinsip demokrasi yang adil.

Penelitian dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa partisipasi pemilih cenderung lebih rendah di daerah dengan prevalensi politik uang yang tinggi. Pemilih merasa bahwa suara mereka tidak dihargai karena hasil pemilu sudah ditentukan oleh uang. Fenomena ini menurunkan tingkat partisipasi politik dan mencerminkan apatisme masyarakat terhadap proses pemilu, yang berdampak buruk pada legitimasi pemerintahan yang terpilih.

Survei oleh Transparency International Indonesia menunjukkan bahwa 60% responden percaya bahwa politik uang merusak demokrasi, dan hanya 20% dari kasus politik uang yang dilaporkan ditindaklanjuti hingga proses hukum. Ini mencerminkan rendahnya efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku politik uang dan menandakan adanya celah besar dalam sistem hukum dan pengawasan. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan efektif, politik uang akan terus menjadi ancaman bagi demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Berikut adalah lima data faktual tambahan yang ditemukan dalam penelitian ini.

**Tabel 1. Data Fakta tentang Money Politic**

No.	Fakta	Presentase
1	Pemilih yang mengaku menerima uang/barang di pemilu 2019	40%
2	Kandidat yang menghabiskan lebih dari Rp 1 miliar untuk kampanye dan memenangkan kursi di daerah pemilihan Jawa Barat	-
3	Pemilih yang merasa partisipasi tidak dihargai di daerah dengan prevalensi politik uang tinggi	Rendah
4	Responden yang percaya politik uang merusak demokrasi	60%
5	Kasus politik uang yang ditindaklanjuti hingga proses hukum dari total 200 kasus yang dilaporkan	20%

Indonesia Corruption Watch (ICW). (2020). Laporan Pemantauan Money Politic di Pemilu 2019. Jakarta: ICW

## **KESIMPULAN**

Money politic merupakan ancaman serius bagi demokrasi yang sehat dan integritas pemilu. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif meliputi penegakan hukum yang tegas, peningkatan pendidikan politik, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proses pemilu. Kerjasama antara pemerintah, lembaga pemantau, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan pemilu yang bebas dari politik uang dan demokrasi yang berintegritas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2020). Laporan Pemantauan Money Politic di Pemilu 2019. Jakarta: ICW.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2021). Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019. Jakarta: KPU.
- Transparency International Indonesia. (2020). Survei Persepsi Publik terhadap Politik Uang di Indonesia. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2020). Studi Partisipasi Pemilih dan Politik Uang di Pemilu 2019. Jakarta: LSI.
- Hadiz, V. R. (2004). Politik Lokal Indonesia: Studi Perbandingan tentang Desentralisasi di Indonesia. Routledge.
- Pratama, A. R. (2020). Pemilu dan Politik Uang: Tantangan Demokrasi di Indonesia. Pustaka Pelajar.
- Setiawan, D. (2018). Peran Media Massa dalam Pemilu: Studi Kasus Pemilu 2014 di Indonesia. Penerbit Universitas Indonesia.
- Susanto, A. (2017). Pemilihan Umum dan Peran Penegak Hukum: Tinjauan atas Proses Penegakan Hukum dalam Kasus Politik Uang di Indonesia. Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Demokrasi Dijual: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia. Cornell University Press.
- Buehler, M. (2013). Islam Politik di Indonesia: Studi tentang Organisasi Islamis, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Southeast Asia Program Publications.
- Begovic, M. E. H., & Cuan, B. (2021). Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia. *Sol Justicia*, 4(2), 105-122.
- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(1), 52-66.
- Istiqomah, N. P., & Harisudin, M. N. (2021). Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif. *Rechtenstudent*, 2(1), 83-97.